



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# **PERKEMBANGAN DAN TINDAK LANJUT DEREGULASI (PAKET I - XII)**

Update: 23 Juni 2016

# Resume Perkembangan Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I-XII

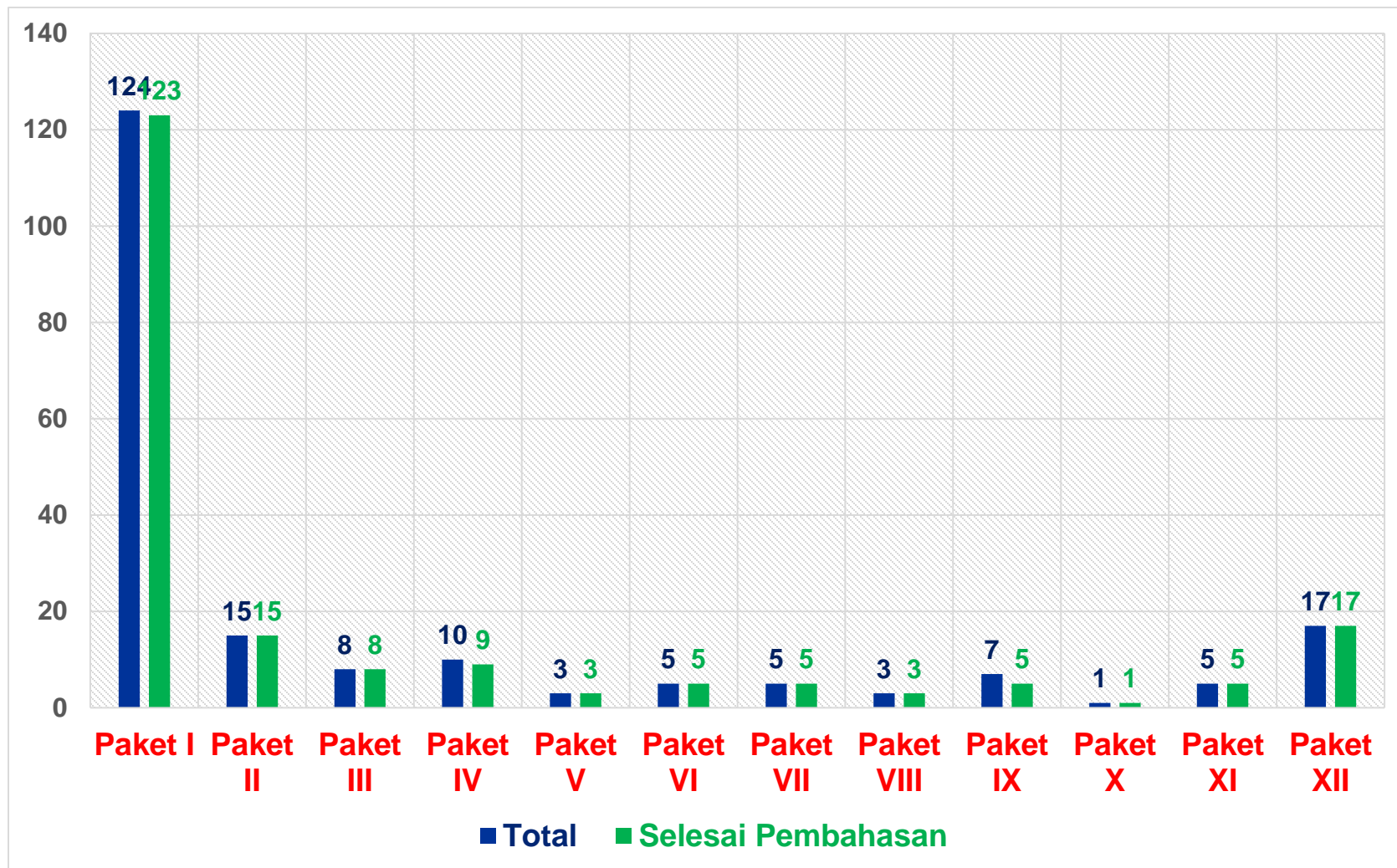
---

- Jumlah total regulasi yang dideregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I-XII sebanyak 213 (50 tingkat Presidensial dan 163 tingkat K/L), dimana setelah dilakukan pembahasan diputuskan untuk mengeluarkan sebanyak 10 regulasi (1 tingkat Presidensial dan 9 tingkat K/L) sehingga jumlah efektif deregulasi sebanyak 203 regulasi, dengan rincian:
  1. Regulasi Selesai sebanyak **200 regulasi (98%)**
  2. Regulasi Pembahasan sebanyak **3 regulasi (2%)**.
- Jenis regulasi:
  1. Regulasi Presidensial (PP, Perpres, Kepres, dan Inpres) sebanyak 49 regulasi: regulasi selesai sebanyak 48 regulasi dan regulasi belum selesai sebanyak 1 regulasi.
  2. Kementerian/Lembaga (Permen, Peraturan Kepala, Peraturan BI/OJK, Kepmen, Instruksi Menteri, Perdirjen, Kepdirjen, dan MoU) sebanyak 154 regulasi: regulasi selesai sebanyak 152 regulasi, regulasi belum selesai sebanyak 2 regulasi.

# Rekapitulasi Penyelesaian Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I-XII

No	Paket	Selesai	Dibahas	Jumlah
1	Paket I	123	1	124
2	Paket II	15	-	15
3	Paket III	8	-	8
4	Paket IV	9	1	10
5	Paket V	3	-	3
6	Paket VI	5	-	5
7	Paket VII	5	-	5
8	Paket VIII	3	-	3
9	Paket IX	6	1	7
10	Paket X	1	-	1
11	Paket XI	5	-	5
12	Paket XII	17	-	17
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>	<b>3</b>	<b>203</b>
<b>Persentase</b>		<b>98%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

# Distribusi Penyelesaian Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I - XII



# Rekapitulasi Penyelesaian Kebijakan Deregulasi Berdasarkan Pembagian Presidential-Kementerian

PAKET	TINGKAT REGULASI	JUMLAH	SELESAI	PERSENTASE	KETERANGAN
I	Presidensial	29	28	97%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presidensial:</b> PP, Perpes, Inpres</li> <li>• <b>K/L:</b> Permen, SE. Menteri, Per. Dirjen, SE. Dirjen, MOU, Perka.</li> </ul>
	K/L	95	95	100%	
	Jumlah	124	123	90%	
II	Presidensial	4	4	100%	
	K/L	11	11	100%	
	Jumlah	15	15	100%	
III	Presidensial	1	1	100%	
	K/L	7	7	100%	
	Jumlah	8	8	100%	
IV	Presidensial	-	-	-	
	K/L	10	9	90%	
	Jumlah	10	9	90%	
V	Presidensial	-	-	-	
	K/L	3	3	100%	
	Jumlah	3	3	100%	
VI	Presidensial	3	3	100%	
	K/L	2	2	100%	
	Jumlah	5	5	100%	
VII	Presidensial	2	2	100%	
	K/L	3	3	100%	
	Jumlah	5	5	80%	
VIII	Presidensial	2	2	100%	
	K/L	1	1	100%	
	Jumlah	3	3	100%	

# Rekapitulasi Penyelesaian Kebijakan Deregulasi Berdasarkan Pembagian Presidential-Kementerian

PAKET	TINGKAT REGULASI	JUMLAH	SELESAI	PERSENTASE	KETERANGAN
IX	Presidensial	2	2	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presidensial</b>: PP, Perpes, Inpres</li> <li>• <b>K/L</b>: Permen, SE. Menteri, Per. Dirjen, SE. Dirjen, MOU, Perka.</li> </ul>
	K/L	5	4	60%	
	Jumlah	7	6	71%	
X	Presidensial	1	1	100%	
	K/L	-	-	-	
	Jumlah	1	1	100%	
XI	Presidensial	3	3	100%	
	K/L	2	2	100%	
	Jumlah	5	5	80%	
XII	Presidensial	2	2	100%	
	K/L	15	15	100%	
	Jumlah	17	17	100%	
Total Paket	Total Presidential	49	48	98%	
	Total K/L	154	152	98%	
	Grand Total Regulasi	203	200	98%	

# Daftar Peraturan Yang Belum Selesai Pembahasan

NO	PAKET	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
1	Paket I (F.6)	Kemen ESDM	Peraturan Presiden tentang Tata kelola Gas Bumi, untuk membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator)	Masih diproses di Kementerian ESDM
2	Paket IV (B.6)	Kemenaker	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Komponen Hidup Layak	Masih diproses di Kemenaker
3	Paket IX (C.1)	Kominfo	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	Masih diproses di Kementerian Kominfo

## Daftar Draft Regulasi Yang Sudah Disampaikan Ke Setneg / Setkab

No	Paket	Nama Peraturan
1	I	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
2	I	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
3	I	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.
4	I	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Ket: Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 10 Juli 2016 Nomor Surat S-147/M.EKON/06/2016
5	XII	Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.  Ket: Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 20 Mei 2016 Nomor Surat S-240/M.EKON/05/2016

### Catatan:

Nomor 1, 2, 3 telah dikembalikan Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan penyempurnaan (Surat Nomor: B.100/M.Sesneg/D-1/HK.02/2016 tanggal 9 Februari 2016)



## Daftar Peraturan Yang Dikeluarkan ... (1/5)

NO	PAKET /KODE	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
1	Paket I  (C.3)	Kemendag	Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor non farmasi berdasarkan Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan mekanisme ET dengan sistem NSW yang memberikan report secara real time	Kemendag menyampaikan kalau masih perlu dibicarakan dengan Badan Narkotika Nasional, pilihannya adalah tetap di Kemendag dalam bentuk Permendag atau didelegasikan kepada BNN. Arahan Pak Menko agar jangan terlalu lama diambil keputusan, kalau memang tidak bisa/tidak dapat dideregulasi agar dikeluarkan.
2	Paket I  (C.14)	Kemendag	Perdirjen Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perijinan Minuman Beralkohol untuk menegaskan kembali peran Pemda dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara rinci pengertian tempat penjualan eceran lainnya	Pemerintah lebih mementingkan untuk melindungi generasi muda sehingga menganggap tidak memerlukan deregulasi mengenai ini.

## Daftar Peraturan Yang Dikeluarkan ... (2/5)

NO	PAKET/ KODE	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
3	Paket I C.25 (57)	Kemendag	Permendag yang merevisi Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Impor Mutiara, untuk menghilangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API.	<p>Dikeluarkan dari list deregulasi sesuai surat Mendag No.906/M-DAG/SD/11/2015 jo. Surat Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Kementerian Perdagangan No.06/SAM.PJ/SD/01/2016 perihal Perkembangan Capaian Penyelesaian Deregulasi dan Debirokratisasi Paket Ekonomi tahap I di Bidang Perdagangan tanggal 19 Januari 2016.</p> <p>Alasan: Kemendag berpendapat bahwa tidak relevan menghilangkan persyaratan API, sementara API merupakan identitas bagi pelaku usaha yang akan melakukan impoptasi.</p>

## Daftar Peraturan Yang Dikeluarkan ... (3/5)

NO	PAKET/ KODE	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
4	Paket I  (D.5)	Kemenkeu	Permenkeu yang melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu untuk menegaskan biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas (Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2015), untuk memberikan ketegasan bahwa, biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas	Sudah dibahas di kantor Menko. Dan dinyatakan tidak dapat direvisi sehingga dikeluarkan dari daftar list deregulasi
5	Paket I  (F.3)	Kemen ESDM	PP perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk debirokratisasi dengan memperpendek jangka waktu proses pengajuan perpanjangan IUP, IUPK, KK, dan PKP2B	Dikeluarkan karena perubahan baru bisa dilakukan saat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara selesai direvisi. Menteri ESDM akan menyampaikan surat permohonan kepada Menko Perekonomian agar PP Nomor 23 Tahun 2010 ini dikeluarkan dari list deregulasi.

## Daftar Peraturan Yang Dikeluarkan ... (4/5)

NO	PAKET/ KODE	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
6	Paket I (I.3)	Kemenaker	MoU antara Menaker dan Menperin untuk Integrasi pelaporan perusahaan	Dikeluarkan dari daftar list deregulasi karena dapat dilakukan dengan tugas fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga
7	Paket I (J.2)	Kemenhub	Permenhub yang merevisi Permenhub No. 74/2015 jo No. 78/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Jasa Transportasi, untuk menyesuaikan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Dikeluarkan karena tidak ada yang perlu direvisi
8	Paket I (J.4)	Kemenhub	Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Permen Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, untuk menyederhanakan persyaratan perizinan yang redundansi, antara lain izin usaha pokok dari instansi terkait, rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur yang terkait dengan kesesuaian tata ruang, study kelayakan proyek, rekomendasi syahbandar, rekomendasi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset minimal Rp 50 T	Dikeluarkan karena tidak ada yang perlu direvisi

## Daftar Peraturan Yang Dikeluarkan ... (5/5)

NO	PAKET/ KODE	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
9	Paket I (J.5)	Kemenhub	Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor 14 tahun 2007 tentang Peti Kemas di Jalan, untuk meningkatkan pengawasan berat angkutan jalan	Dikeluarkan karena tidak ada yang perlu direvisi
10	Paket I (J.6)	Kemenhub	Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan, untuk menetapkan denominasi Rupiah dalam tarif jasa parkir pesawat	Dikeluarkan karena tidak ada yang perlu direvisi

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap I Berdasarkan K/L ... (1/2)

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai		Dibahas	Dikeluarkan	Jumlah	Keterangan
		Sudah di tandatangani	Belum di tandatangani (proses paraf)				
A	Kemenko Perekonomian	2	0	0	0	2	1 Perpres, 1 Inpres
B	Kementerian Perindustrian	14	1*)	0	0	15	1 PP, 13 Permen *) Kelompok 32 Permenperin
C	Kementerian Perdagangan	27	2	0	3	32	30 Permen, 1 Perdirjen, 1 SE Mendag
D	Kementerian Keuangan	8	1	0	1	10	4 PP, 6 Permen *) 1 Permen diusulkan dikeluarkan
E	Kementerian Pertanian	7	0	0	0	7	1 PP, 1 Perpres, 5 Permen
F	Kementerian ESDM	8	1	1	1	11	2 PP, 7 Perpres, 1 Permen, 1 Surat Dirjen
G	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	6	4	0	0	10	6 PP, 1 Perpres, 3 Permen Penyelesaian 3 Permen menunggu penetapan revisi Perpres 71 Tahun 2012
H	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	2	0	0	2	2 Permen
I	Kementerian Ketenagakerjaan	2	0	0	1	3	2 PP, 1 MoU *) 1 PP & 1 Mou diusulkan dikeluarkan
J	Kementerian Perhubungan	1	0	0	4	5	5 Permen *) 4 Permen diusulkan dikeluarkan
K	Kementerian PUPR	1	0	0	0	1	1 PP

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap I Berdasarkan K/L ... (2/2)

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai		Dibahas	Dikeluarkan/	Jumlah	Keterangan
		Sudah di tandatangani	Belum di tandatangani (proses paraf)				
L	Kementerian Kesehatan	1	0	0	0	1	1 Permen
M	Kementerian Pariwisata	2	0	0	0	2	2 Perpres
N	Kementerian KUKM	29	0	0	0	29	29 Permen *) Substansi 29 permen telah digabungkan/disederhanakan menjadi 16 Permen yang telah ditetapkan
O	BKPM	2	0	0	0	2	2 Perka BPKM
P	BPOM	2	0	0	0	2	2 Perka BPOM
	<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>134</b>	
		<b>123</b>					

## Rekapitulasi Deregulasi Tahap II Berdasarkan K/L

No	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kementerian Keuangan	4	-	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan pengurusan tax allowance dan tax holiday</li> <li>Pembebasan PPN untuk alat transportasi</li> <li>Fasilitas Pusat Logistik Berikat</li> <li>Pengurangan pajak bunga deposito untuk DHE</li> </ul> 4 PP (3 PP telah selesai di Paket I)
B	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7	-	7	Penyederhanaan perizinan sektor kehutanan (7 Permen)
C	BKPM	4	-	4	Layanan Cepat Investasi 3 jam 4 Perka (2 Perka ada dalam Paket I, 2 Perka tambahan di Paket I)
	Jumlah	15	-	15	



# Rekapitulasi Deregulasi Tahap III Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	1	-	1	Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal (1 Permen)
B	Kementerian ESDM	1	-	1	Pengaturan harga gas
C	Otoritas Jasa Keuangan	1	-	1	Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank
		1	-	1	Skema asuransi pertanian
		1	-	1	Revitalisasi industri modal ventura
		1	-	1	Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
		1	-	1	Pemberdayaan Lembaga Ekspor Indonesia
		1	-	1	Implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit
	Jumlah	8	-	8	

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap IV Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kemenko Perekonomian	2	-	2	Perluasan KUR (1 Permen, 1 Kepmen)
B	Kementerian Ketenagakerjaan	7 <sup>*</sup>	1	8	8 Permen turunan PP Pengupahan 1 Permen merupakan penggabungan 3 Permen
	Jumlah	9	1	10	

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap V Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kementerian Keuangan	1	-	1	Revaluasi Aset
		1	-	1	Kebijakan menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti, dan Infrastruktur
B	BI / OJK	1	-	1	Deregulasi di bidang Perbankan Syariah
	Jumlah	3	-	3	

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap VI Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kemenko Perekonomian	1	-	1	Fasilitas KEK (1 PP)
B	Kementerian PUPR	2	-	2	Penyediaan Air (2 PP)
C	BPOM	2	-	2	Simpifikasi Perizinan BPOM (2 Perka)
	Jumlah	5	-	5	

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap VII Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kementerian Keuangan	2	-	2	2 peraturan Insentif Pajak bagi Industri Padat Karya: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Revisi PP No. 18/2015</li><li>▪ PP baru tentang Insentif PPh Karyawan Industri Padat Karya</li></ul>
B	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	3	-	3	2 Peraturan Menteri dan 1 Instruksi Menteri tentang Percepatan proses sertifikasi tanah
	Jumlah	5	-	5	

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap VIII Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Badan Informasi Geospasial	1	-	1	Penerbitan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
B	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	-	1	Percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak
C	Kementerian Keuangan	1	-	1	Revisi Peraturan Menteri mengenai insentif Bea Masuk 0% untuk 21 Pos tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan/pemeliharaan pesawat terbang
	Jumlah	3	-	3	

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap IX Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kementerian ESDM	1	-	1	Percepatan penyediaan dan pemenuhan tenaga listrik melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan
B	Kementerian Pertanian	1	-	1	Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
C	Kementerian Kominfo	-	1	1	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos
D	Kementerian BUMN	2	-	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan mengenai penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik (Single Billing).</li> <li>Kebijakan Sinerjitas Badan Usaha Milik Negara dengan Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk Usaha Kecil dan Menengah, Geographical Indications, dan Ekonomi Kreatif.</li> </ul>
E	Kementerian Perhubungan	2	-	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Kepelabuhan Secara Elektronik (Permenhub).</li> <li>Revisi Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi</li> </ul>
	Jumlah	6	1	7	

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap X Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kemenko Bidang Perekonomian	1	-	1	Mendorong peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (asing) untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dan berbagai sektor strategis nasional.
	Jumlah	1	-	1	



# Rekapitulasi Deregulasi Tahap XI Berdasarkan K/L

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai	Dibahas	Jumlah	Keterangan
A	Kementerian Keuangan	4	-	4	Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)
					Menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal 5% kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE
					Menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai insentif dan kemudahan investasi di daerah yang antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.
					Surat dari Dewan Pengarah INSW kepada Pengelola Portal INSW untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Indonesia Single Risk Management (ISRM) bagi Kementerian/Lembaga terkait INSW.
B	Kementerian Kesehatan	1	-	1	Instruksi Presiden tentang Pengembangan Industri Farmasi dan Alat kesehatan dalam rangka mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri.
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	

# Rekapitulasi Deregulasi Tahap XII Berdasarkan K/L ... (1/2)

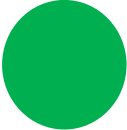
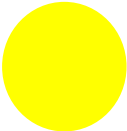
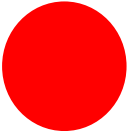
NO	Kementerian/Lembaga	Selesai		Dibahas	Dikeluarkan	Jumlah	Keterangan
		Sudah di tandatangani	Belum di tandatangani (proses paraf)				
1	Kementerian Hukum dan HAM	2	-	-	-	2	1 PP, 1 Permen
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	-	-	-	2	1 Permen, 1 SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	1	-	-	-	1	1 Permen
4	Kementerian Perdagangan	2	-	-	-	2	2 Permen
5	Kementerian ESDM	1	-	-	-	1	1 Permen
6	Kementerian Dalam Negeri	1	-	-	-	1	1 Permen
7	Kementerian Keuangan	1	1	-	-	2	1 Peraturan Dirjen Pajak, 1 PP
8	PT Perusahaan Listrik Negara	1	-	-	-	1	1 SE Direksi PT PLN
9	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	-	-	-	1	1 Peraturan Kepala BPJS
10	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	-	-	-	1	1 Instruksi Gubernur
11	Mahkamah Agung	1	-	-	-	1	1 SE Mahkamah Agung

## Rekapitulasi Deregulasi Tahap XII Berdasarkan K/L ... (2/2)

NO	Kementerian/Lembaga	Selesai		Dibahas	Dikeluarkan/	Jumlah	Keterangan
		Sudah di tandatangani	Belum di tandatangani (proses paraf)				
12	PDAM DKI Jakarta	-	1	-	-	1	1 Keputusan Direksi
13	PDAM Surabaya	-	1	-	-	1	1 Keputusan Direksi
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	

# LEGENDA (Arti Simbol)

---

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sudah terbit peraturan baru untuk menggantikan peraturan yang lama;</li><li>2. Sudah selesai pembahasan substansi tinggal menunggu proses penetapan oleh Presiden dan/atau pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM;</li><li>3. Setelah dibahas secara substansi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dianggap tidak perlu diubah atau direvisi.</li></ol>
	Masih dalam proses pembahasan baik di kementerian terkait atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Dikeluarkan dari list deregulasi tanpa melalui proses pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena dianggap tidak perlu dideregulasi





# RINCIAN PAKET I

---

# A. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
A.1 (29)	Inpres Inland FTA	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah Terbit Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan di Dalam Negeri ( <i>Inland Free Trade Arrangement</i> )	
A.2 (30)	Inpres Kebijakan Deregulasi Nasional	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Instruksi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha	
A.3 (-)	Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Tambahan	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	
A.4 (-)	Inpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Tambahan	Telah terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	

## B. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN





NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
B.1 (1)	PP Sarana Penunjang Pengembangan Industri (Kawasan Industri)	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	
B.2 (66)	Permenperin yang merevisi Permenperin No 68/M-IND/PER/8/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 untuk menghilangkan persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB)	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib.	
B.3 (67)	Pencabutan Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas Permenperin No. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib untuk membatalkan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan dengan tujuan fortifikasi.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor 100/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.	
B.4 (68)	Permenperin yang merevisi Permenperin No. 34/M-IND/PER/4/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca pengaman kendaraan bermotor yang non SNI	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 80/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Secara Wajib.  <b>Digabung dengan B.14 dan B.5</b>	

## B. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN




NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
B.5 (70)	Permenperin yang merevisi Permenperin No. 50/M-IND/PER/6/2014 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe dan pemeriksaan teknis cermin kaca yang non SNI	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 80/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Secara Wajib.	
B.6 (71)	Permenperin yang merevisi Permenperin No. 82/M-IND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/M-IND/PER/8/2012, dan Permenperin No. 84/M-IND/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis keramik yang non SNI	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 81M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib.	
B.7 (72)	Permenperin yang merevisi Permenperin No 40/M-IND/PER/6/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe helm	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.	
B.8 (73)	Permenperin yang merevisi Permenperin No 15/M-IND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe selang kompor LPG	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 75/M-IND/PER/9/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.  Telah terbit Permenperin Nomor 02/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.	



## B. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
B.9 (74)	Permenperin yang merevisi Permenperin No 81/M-IND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 untuk menghilangkan kewajiban adanya surat pertimbangan teknis Tanki Air Silinder – Polietilena	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 78/M-IND/PER/9/2015 tentang Perbelakuan Standar Nasional Indonesia Plastik-Tangki Air Plastik Silinder Vertikal-Polietilena (PE) Secara Wajib.	
B.10 (75)	Permenperin yang merevisi Permenperin No 67/M-IND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 84/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Karet Perapat (Rubber Seal) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib	
B.11 (76)	Permenperin yang merevisi Permenperin No 20/M-IND/PER/2/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 77/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib.	
B.12 (77)	Permenperin yang merevisi 32 Permenperin untuk menghilangkan kewajiban rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah selesai pembahasan, ada 14 Permenperin yang akan tetap dipertahankan karena rekomendasi akan diterapkan dengan metode Online yang terintegrasi dengan portal INSW.	



## B. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
B.13 (78)	Permenperin yang merevisi Permenperin No. 18/M-IND/PER/2/2012 jo Permenperin No. 67/M-IND/PER/8/2014, untuk menghilangkan persyaratan surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI, dan Penetapan IP-IT Semen serta pengendalian dilakukan dengan post audit.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah Terbit Permenperin Nomor: 82/M-IND/PER/9/2015 tentang Permemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib.	
B.14 (69)	Permenperin yang merevisi Permenperin No. 44/M-IND/PER/4/2011 jo Permenperin No. 04/M-IND/PER/1/2010 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca lembaran yang non SNI	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permenperin Nomor: 80/M-IND/PER/9/2015 tanggal 29 September 2015	
B.15 (73)	Permenperin yang merevisi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dari Kemenperin untuk menjadi eksportir terdaftar produk minerba berdasarkan Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/5/2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2014 tentang Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.	



## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.1 (33)	Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor kayu pada Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah ketat pengawasannya	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag Baru No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Peraturan ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.	
C.2 (34)	Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor Beras berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan SPE Beras dan tidak memerlukan penelitian laboratorium	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 103/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras ( <b>gabung dengan C.20</b> )	
C.3 (35)	Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor non farmasi berdasarkan Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan mekanisme ET dengan sistem NSW yang memberikan report secara real time	Ada dalam list Paket Deregulasi	Dikeluarkan dari list deregulasi sesuai surat Mendag No.906/M-DAG/SD/11/2015 jo. Surat Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Kementerian Perdagangan No.06/SAM.PJ/SD/01/2016 perihal Perkembangan Capaian Penyelesaian Deregulasi dan Birokratisasi Paket Ekonomi tahap I di Bidang Perdagangan tanggal 19 Januari 2016.	
C.4 (36)	Permendag yang merubah Permendag Nomor 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan dengan menghilangkan pengimporan kemasan tertentu (HS 48) kebutuhan produsen melalui IT dan rekomendasi Kemen LHK	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan	

## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.5 (37)	Permendag yang merevisi Permendag No 61/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan penelusuran teknis dan Laporan Surveyor sebagai dokumen pre-clearance produk kosmetika karena menambah tambahan waktu 17-26 hari dari RFI hingga tersedianya LS.	Ada dalam list Paket Deregulasi	<b>Penggabungan dengan C.24.</b>  Telah terbit Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.	
C.6 (38)	Permendag yang merevisi Permendag No. 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai diintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata serta debirokratisasi dengan mengintegrasikan dua kali pemeriksaan fisik yang menjadi kendala kelancaran ekspor CPO	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 90/M-DAG/PER/10/2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya tanggal 22 Oktober 2015	

## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.7 (39)	Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin. (sebaiknya kebijakan perdagangan gula ini di tetapkan dengan Perpres), sebagai debirokratisasi dengan mengawasi impor gula berdasarkan performance perusahaan, penentuan di tentukan bersama Kementerian terkait, rakortas. Mekanisme akan diatur di revisi Permendag	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 117/M-DAG/PER/12/2015 tgl 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Impor Gula	
C.8 (40)	Permendag yang merevisi Permendag 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun untuk memberikan kemudahan pengadaan impor waste paper, skrap baja, dll sebagai bahan baku industri, sebagai deregulasi untuk memberikan kelancaran bahan baku industri	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 31/M-DAG/PER/4/2016 tgl 9 Mei 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3	
C.9 (41)	Permendag yang merevisi Permendag No. 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, untuk menghilangkan rekomendasi dan persyaratan dokumen penyerta barang impor, seperti NPWP, TDP, SIUP/IUI.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.	




## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.10 (42)	Permendag yang merevisi Permendag No. 41/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripoliphosphate (STPP) dengan menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan pengawasannya dilakukan dengan post audit	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor <i>Sodium Tripholyphospate</i> (STPP).	
C.11 (43)	Permendag yang merevisi Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 untuk menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor, serta melakukan pengawasan melalui sistem post audit	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 113/M-DAG/PER/12/2015 tgl 23 Desember 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja	
C.12 (44)	Permendag yang menunda atau membatalkan Permendag No 45/M-DAG/PER/6/2015, karena sulit diimplementasikan mengingat syarat-syarat pengimporan ban yang membuat tidak ekonomis untuk dilaksanakan	Ada dalam list Paket Deregulasi.	Telah terbit Permendag Nomor 78/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban.	
C.13 (45)	Permendag yang merevisi Permendag No. 55 /M-DAG/PER/9/2014 untuk menghilangkan surat rekomendasi Kemenperin untuk impor produk Barang Berbasis Sistem Pendingin	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah Terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.	

## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN




NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.14 (46)	Perdirjen Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perijinan Minuman Beralkohol untuk menegaskan kembali peran Pemda dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara rinci pengertian tempat penjualan eceran lainnya	Ada dalam list Paket Deregulasi	Dikeluarkan dari list deregulasi sesuai surat Mendag No.906/M-DAG/SD/11/2015 jo. Surat Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Kementerian Perdagangan No.06/SAM.PJ/SD/01/2016 perihal Perkembangan Capaian Penyelesaian Deregulasi dan Debirokratisasi Paket Ekonomi tahap I di Bidang Perdagangan tanggal 19 Januari 2016.  Alasan: Pemerintah lebih mementingkan untuk melindungi generasi muda sehingga menganggap tidak memerlukan deregulasi mengenai ini.	
C.15 (47)	Permendag yang merevisi Permendag No. 4/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 119/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian	
C.16 (48)	Permendag yang merevisi Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Angka Pengenal Impor, untuk menegaskan bahwa API merupakan satu-satunya identitas importir, sedangkan identitas bagi importir dalam rangka tata niaga impor dihilangkan dan diganti dengan SPI yang kemudian secara bertahap ditransformasi dengan sistem perlindungan tarif.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sudah diterbitkan Permendag pengganti yaitu Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir.	

## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN




NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.17 (49)	Permendag yang merevisi Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, untuk menghilangkan SPB-SNI wajib dalam setiap pengimporan dan diganti dengan pengawasan post audit di pasar dalam negeri	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.	
C.18 (50)	Surat Edaran Mendag yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007, dan Permendag No.70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum punya RDTR	Ada dalam list Paket Deregulasi	Mendag telah menyampaikan R.Perpres tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Menkumham untuk dilakukan proses harmonisasi melalui Surat Dinas Mendag No. 864/M-DAG/SD/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015	
C.19 (51)	Permendag yang merevisi Permendag No 67/M-DAG/PER/11/2013 jo Permendag No 10/M-DAG/PER/1/2014, untuk menghilangkan SKPLBI/SPKPLBI sebagai izin penggunaan label berbahasa Indonesia menjadi pengawasan dengan sistem post audit di pasar dalam negeri	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.	







## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.20 (52)	Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan impor dan ekspor beras, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dalam impor beras kebutuhan industri	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 103/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras <b>Gabung dengan C.2</b>	
C.21 (53)	Permendag yang merevisi Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendag No. 40/M-DAG/PER/8/2015, untuk menghilangkan IT hortikultura dan Surat Pertimbangan Teknis Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemenperin	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag pengganti yaitu Permendag Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura yang	
C.22 (54)	Permendag yang merevisi Permendag No. 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, untuk menegaskan perizinan online dan menghilangkan persyaratan API dalam pengajuan perizinan	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh.	




## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.23 (55)	Permendag yang merevisi Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik, untuk menghilangkan rekomendasi dari Kemenperin	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag Nomor 86/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik.	
C.24 (56)	Permendag yang merevisi Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan IT dan menggantinya dengan SPI yang kemudian secara bertahap pengawasan dilakukan melalui instrumen tarif	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.  <b>Penggabungan dengan C.5.</b>	
C.25 (57)	Permendag yang merevisi Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Impor Mutiara, untuk menghilangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Dikeluarkan dari list deregulasi sesuai surat Mendag No.906/M-DAG/SD/11/2015 jo. Surat Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Kementerian Perdagangan No.06/SAM.PJ/SD/01/2016 perihal Perkembangan Capaian Penyelesaian Deregulasi dan Debirokratisasi Paket Ekonomi tahap I di Bidang Perdagangan tanggal 19 Januari 2016.  Alasan: Kemendag berpendapat bahwa tidak relevan menghilangkan persyaratan API, sementara API merupakan identitas bagi pelaku usaha yang akan melakukan imporptasi.	




## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.26 (58)	Permendag yang merevisi Permendag No 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dan melarang impor barang-baru untuk alat kesehatan.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 127/M-DAG/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru	
C.27 (59)	Permendag yang merevisi Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, untuk menghilangkan verifikasi Surveyor.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah selesai pembahasan	
C.28 (60)	Permendag yang merevisi Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO), untuk menghilangkan ketentuan IT dan verifikasi Surveyor	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 8 Oktober.	
C.29 (61)	Permendag yang merevisi Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna sebagaimana telah diubah dengan permendag no. 7/M-DAG/PER/2/2012, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 102/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 8 Desember 2015	




## C. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
C.30 (62)	Permendag yang merevisi Permendag No. 58/2012 ttg Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014 tentang Roadmap Garam Industri, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag No. 125/M-DAG/PER/12/2015 (mencabut Permendag No. 58/2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendag Permendag No. 88/M-DAG/PER/10/2015)	
C.31 (63)	Permendag yang mencabut Permendag No. 61/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian, untuk mengatasi kendala kelancaran arus barang	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag pengganti yaitu Permendag Nomor 74/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi	
C.32 (64)	Permendag yang mencabut No. 11/M-DAG/PER/3/2010 jo. Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku cakram optik kosong, dan cakram optik isi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permendag Nomor 76/M-DAG/PER/9/2015 tentang pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012.	




## D. KEMENTERIAN KEUANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
D1 (2)	PP Pusat Logistik Berikat, untuk membangun fasilitas industri dan perdagangan yang efisien, karena lebih dekat dengan kegiatan ekonomi yang menurunkan biaya logistik	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	
D2 (3)	PP tentang PPN Jasa Kepelabuhanan, untuk memberikan insentif PPN bagi angkutan laut luar negeri	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Luar Negeri	
D3 (4)	PP yang merevisi PP No 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, untuk insentif, PPN dibebaskan bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai	
D4 (5)	PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN, untuk insentif, PPN tidak dipungut bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)			



## D. KEMENTERIAN KEUANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
D5 (79)	Permenkeu yang melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu untuk menegaskan biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas (Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2015), untuk memberikan ketegasan bahwa, biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas	Ada dalam list Paket Deregulasi  Dikeluarkan dari list	Sudah dibahas di kantor Menko. Dan dinyatakan tidak dapat direvisi sehingga dikeluarkan dari daftar list deregulasi	
D6 (80)	Permenkeu yang merevisi Permenkeu No. 176 tahun 2013 dan Permenkeu No. 177 tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor, untuk memanfaatkan fasilitas pusat logistik berikat dalam pengembangan ekspor oleh IKM	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah selesai pembahasan	
D7 (81)	Permenkeu yang merevisi Permenkeu Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewan Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk pemberian fasilitas PPnBM atas hunian mewah berupa kelonggaran batasan pengenaan berupa harga jual per unit	Ada dalam list Paket Deregulasi	Permenkeu No. 206/PMK.010/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewan Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah	

## D. KEMENTERIAN KEUANGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
D8 (82)	Revisi PMK No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dalam rangka pemberian fasilitas bea masuk bagi restrukturisasi/pengembangan industri serta multi tafsir pada kata “dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi ...”.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Permenkeu 188/PMK.010/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Perubahan Kedua Permenkeu No. 176/PMK.011/2009	
D9 (83)	Permenkeu yang merevisi PMK 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah selesai, cukup Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai, digabung dengan D.10 (84).  Telah selesai, cukup Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai sebagai pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor yang dikenakan bea keluar dilakukan pemeriksaan hanya satu kali oleh bea cukai bersama surveyor	
D10 (84)	Permenkeu yang merevisi No.136/PMK.010/2015, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah selesai, cukup Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai sebagai pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor yang dikenakan bea keluar dilakukan pemeriksaan hanya satu kali oleh bea cukai bersama surveyor	

## E. KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
E1. (9)	RPP tentang Pembiayaan Hortikultura	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Holtikultura	
E2. (16)	Revisi Perpres 172 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan / Jasa Pemerintah, untuk memasukkan memasukkan benih dan bibit hortikultura dan perkebunan melalui pengadaan langsung	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sudah dilakukan pembahasan di Kantor Kemenko Perekonomian dan memutuskan bahwa tidak perlu untuk dilakukan perubahan.	
E3. (88)	Revisi Permentan No.2 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, untuk mempersingkat alur benih yang terlalu panjang akan menghambat penyediaan logistik benih.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah Terbit Permentan No. 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi. Dan Peredaran Benih Bina.	
E4. (89)	Revisi Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, untuk meningkatkan pengawasan dan memperberat sanksi peredaran pestisida	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sesuai pembahasan tidak ada revisi peraturan, hanya ditunda pelaksanaannya saja (2 tahun mulai 2015)	
<b>E5. (90)</b>	Permentan yang merevisi Permentan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara, dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal, untuk menyesuaikan keperluan rekomendasi hanya untuk bidang yang telah ditetapkan dalam DNI dan mengurangi persyaratan rekomendasi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Ditargetkan selesai pada awal Desember Tahun 2015  Dikeluarkan dari List karena diatur dalam UU No.18 Tahun 2010 ttg Budidaya Tanaman Pangan	



## E. KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
E6. (91)	Permentan yang merevisi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, untuk merubah pasal 14 yang mewajibkan divestasi kepada koperasi perkebunan setempat	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.401/5/2016 pada tanggal 31 Mei 2016	
E7. (92)	Permentan yang merevisi Permentan Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperluas negara asal impor sebagai bahan baku kebutuhan industri dalam negeri	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tanggal 25 Desember 2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	

## F. KEMENTERIAN ESDM

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
F.1 (23)	Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk transportasi jalan, sebagai kebijakan yang terintegrasi dalam penggunaan BBG untuk transportasi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan	
F.2 (25)	Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil, untuk perluasan pemakaian BBG untuk menghemat biaya bahan bakar bagi nelayan	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga Liquefied Petroleum gas Untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil	
F.3 (16)	PP perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk debirokratisasi dengan memperpendek jangka waktu proses pengajuan perpanjangan IUP, IUPK, KK, dan PKP2B	Ada dalam list Paket Deregulasi	Dikeluarkan karena perubahan baru bisa dilakukan saat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara selesai direvisi. Menteri ESDM akan menyampaikan surat permohonan kepada Menko Perekonomian agar PP Nomor 23 Tahun 2010 ini dikeluarkan dari list deregulasi.	
F.4 (22)	Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri, sebagai pedoman akselerasi pembangunan kilang minyak (termasuk produk turunannya) melalui dana APBN dan penugasan kepada Pertamina	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 146 tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.	

## F. KEMENTERIAN ESDM

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
F.5 (28)	Peraturan Presiden tentang Tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi (Kisdaren), sebagai strategi tanggap darurat apabila terjadinya krisis energi dan darurat energi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kriisis Energi dan/atau Darurat Energi	
F.6 (24)	Peraturan Presiden tentang Tata kelola Gas Bumi, untuk membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator)	Ada dalam list Paket Deregulasi	Masih dalam tahap pembahasan di Kementerian ESDM, Juni 2016 ditargetkan akan selesai	
F.7 (26)	Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas, untuk menegaskan otoritas Pemerintah sebagai kuasa penambangan dalam menetapkan harga gas bumi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi	
F.8 (27)	Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan infrastuktur ketenaga listrikan, untuk deregulasi dan debirokratisasi proses perizinan investasi listrik	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	
F.9 (32)	Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatan <i>cut and fill</i> kawasan industri, untuk memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 32 Tahun 2013 Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.	

## F. KEMENTERIAN ESDM

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
F.10 (31)	Peraturan Menteri ESDM untuk menegaskan tugas Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU, untuk memberikan dasar hukum pembelian solar eceran non subsidi dalam kemasan 1-5 liter untuk kebutuhan industri	Ada dalam list Paket Deregulasi tapi diganti Surat Dirjen Migas	Sudah selesai dengan surat Dirjen Migas 11861/15/DJM.O/2015 tanggal 17 September 2015	
F.11 (17)	PP tentang pusat logistik berikat khusus untuk BBM, LPG, dan Crude Oil, untuk pengembangan usaha pengadaan BBM, LPG, dan Crude Oil	Ada dalam list Paket Deregulasi	Digabung dengan D.1	



## G. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
G.1 (10)	PP yang merevisi PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sudah selesai pembahasan	
G.2 (11)	PP yang merevisi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sudah selesai pembahasan	
G.3 (12)	PP yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT	Ada dalam list Paket Deregulasi	Proses permintaaf paraf menteri	
G.4 (13)	PP yang merevisi PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sudah Selesai Pembahasan	




## G. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
G.5 (14)	PP yang merevisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia	
G.6 (15)	PP yang merevisi PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	
G.7 (21)	Perpres yang merevisi Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	
G.8 (101)	Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permen Agraria/Kepala BPN No. 22 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah	
<b>G.9</b> <b>(102)</b>	Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permen Agraria/Kep. BPN No. 17 tahun 2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Standard Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal	
G.10 (103)	Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan	

## H. KEMENTERIAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN




NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
H.1 (93)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sudah siap, tinggal menunggu ditetapkannya Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.	
H.2 (94)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk-Setjen/PHPL.3/1/2016 tanggal 29 Januari 2016.	

# I. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
I.1 (7)	PP Sistem Pengupahan untuk melaksanakan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan	
I.2 (8)	PP yang mengharmonisasikan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 30/2009 tentang tenaga listrikan, dan UU No. 28/2002 tentang Bangunan gedung, untuk mengintegrasikan perizinan (IMB) yang berkaitan dengan installasi bangunan dan keselamatan kerja	Ada dalam list Paket Deregulasi	Diganti dengan Peraturan Menteri. Telah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir	
I.3 (85)	MoU antara Menaker dan Menperin untuk Integrasi pelaporan perusahaan	Ada dalam list Paket Deregulasi	Dikeluarkan dari daftar list deregulasi karena dapat dilakukan dengan tugas fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga	




## J. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
J.1 (96)	Permenhub yang merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, untuk memberikan perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura (sayur, bunga, buah)	Ada dalam list paket deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara	
J.2 (97)	Permenhub yang merevisi Permenhub No. 74/2015 jo No. 78/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Jasa Transportasi, untuk menyesuaikan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Ada dalam list paket deregulasi	Dikeluarkan karena tidak ada revisi	
J.3 (98)	Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Permen Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, untuk menyederhanakan persyaratan perizinan yang redundansi, antara lain izin usaha pokok dari instansi terkait, rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur yang terkait dengan kesesuaian tata ruang, study kelayakan proyek, rekomendasi syahbandar, rekomendasi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset minimal Rp 50 T	Ada dalam list paket deregulasi	Dikeluarkan	


## J. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
J.4 (99)	Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor 14 tahun 2007 tentang Peti Kemas di Jalan, untuk meningkatkan pengawasan berat angkutan jalan	Ada dalam list paket deregulasi	Dikeluarkan	
J.5 (100)	Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan, untuk menetapkan denominasi Rupiah dalam tarif jasa parkir pesawat	Ada dalam list paket deregulasi	Dikeluarkan	

## K. KEMENTERIAN PU PR

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
K1. (6)	PP Pengusahaan Sumber Daya Air, untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi kegiatan industri	Ada dalam list paket deregulasi	Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air	


## L. KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
L.1 (95)	Permenkes yang merevisi Permenkes No. 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, untuk memberikan penundaan waktu pelaksanaannya pada tahun 2019	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sudah terbit Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap saji	




## M. KEMENTERIAN PARIWISATA

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
M.1 (19)	Perpres yang merevisi Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No.79 tahun 2011 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Perpres Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kinjungan Kapal Wisata (Yatch) Asing ke Indonesia.	
M.2 (20)	Perpres yang merevisi Perpres Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Perpre Nomor 104 Tahun 2015	


# N. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
N1. (104)	Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/KEP/M/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, agar selaras dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta tidak menghambat peleburan dan pembubaran Koperasi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi tanggal 23 September 2015	
N3. (106)	Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil, untuk mendukung koperasi berani masuk ke sektor lain			
N7. (110)	Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembangunan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi			
N8. (111)	Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.UKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi			
N9. (112)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/PER/MENEG/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi			

## N. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM


NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
N2. (105)	Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi dapat membangun modal penyertaan sebagai instrumen modal yang sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat mengembangkan pemupukan modal Koperasi yang berasal dari luar	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit pada tanggal 23 September 2015 Peraturan Menteri Nomor: 11/PER/KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi	
N5. (108)	Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 96/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, agar selaras dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permen No.13/PER/KUKM/IX/2015, tgl 23 September 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi	
N6. (109)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 118/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM, untuk mengakomodir UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan diklat pengembangan kompetensi usaha mikro	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Permen Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah	

## N. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM



NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
N10. (113)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota/Penggerak Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 23/PER/M.KUKM/IX/2015, tgl 28 September 2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi terhadap Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi.	
N18. (121)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/PER/M.KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 3/PER/M.KUKM/1/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi			



## N. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
N4. (107)	Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, agar selaras dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah	Ada dalam list Paket Deregulasi	Sudah terbit pada tanggal 23 September 2015 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi	
N11. (114)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 35.3/PER/K.UKUM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah			
N12. (115)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah			





## N. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
N13. (116)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 17/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi	
N17. (120)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan KSP, serta menyesuaikan dengan Keppres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan terhadap Koperasi			
N14. (117)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/K.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 21/PER/M.KUKM/IX/2015, tanggal 28 September 2015 tentang Peningkatan Koperasi	





## N. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

NO	REGULASI	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
N15. (118)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP	Ada dalam list Paket Deregulasi	Digabung menjadi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang telah terbit pada tanggal 23 September 2015 Nomor : 15/PER/KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi	
N16. (119)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Unit Simpan Pinjam, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP			
N20. (123)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 /PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP			
N19. (122)	Permen Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Permen Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Unit Simpan Pinjam	Tambahan untuk digabung		
N29. (132)	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam			



## N. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

NO	REGULASI	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
N21. (124)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 7/Per/m.KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar, untuk mendorong berkembangnya koperasi yang menjalankan usaha di sektor riil	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomr: 22/PER/M.KUKM/IX/2015, tgl 28 September 2015, tentang Pengembangan Koperasi Skala Besar	
N22. (125)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 10/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi untuk menyesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.UKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi	
N23. (126)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha (pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil, usaha simpan pinjam koperasi, dan usaha simpan pinjam syariah)	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit pada tanggal 23 September 2015 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12/PER/KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill  <b>Gabungan dengan N.26 (129)</b>	
N24. (127)	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 01/PER/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomr: 25/PER/M.KUKM/IX/2015, tgl 28 September 2015, tentang Revitalisasi Koperasi	



## N. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

NO	REGULASI/BATAS WAKTU		LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
N25. 128	Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, untuk menyelaraskan dengan Perpres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24/PER/M.UKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha	
N28. (131)	Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Usaha Simpan Pinjam Syariah, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor simpan pinjam syariah	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015, tgl 23 September 2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi  <b>Digabung dengan N.27 (130)</b>	
N26. (129)	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Nomor 43/PER/M.KUKM/VII/2004 tentang Akuntabilitas Koperasi	Tambahan	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 20/PER/M.KUKM/IX/2015, tgl 28 September 2015, tentang Akuntabilitas Koperasi	
N27. (130)	Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Usaha Simpan Pinjam Konvensional, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor simpan pinjam konvensional	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015, tgl 23 September 2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi  <b>Digabung dengan N.28 (31)</b>	

## O. BKPM

NO	REGULASI/BATAS WAKTU	KETERANGAN	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
O.1 (86)	Revisi Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2003 jo Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis izin usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Perka BKPM No.15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Perka mulai berlaku: a. Untuk PTSP pusat di BKPM tanggal 26 Oktober 2015. b. Untuk BPM PTSP Prov/Kab/Kota, KPBPB dan KEK selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 08 Oktober 2015.	
O.2 (87)	Perka BKPM yang merevisi Perka BKPM No 3 Tahun 2012, agar dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan terutama perubahan investasi dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga K/L terkait dan asosiasi industri mendapatkan informasi perubahan.	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Perka mulai berlaku: a. Untuk PTSP pusat di BKPM tanggal 26 Oktober 2015. b. Untuk BPM PTSP Prov/Kab/Kota, KPBPB dan KEK selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 08 Oktober 2015.	

## P. BPOM





NO	REGULASI/BATAS WAKTU		LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
P.1 (133)	Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Perka BPOM No. 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia	
P.2 (134)	Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia	Ada dalam list Paket Deregulasi	Telah terbit Perka BPOM No. 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia	

## **RINCIAN PAKET II**


---





## A. Kementerian Keuangan (II)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	RPP Percepatan pengurusan tax allowance dan tax holiday	Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Sedang proses paraf menteri terkait	
A.2	RPP Pembebasan PPN untuk alat transportasi	Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai	
A.3	PP Pusat Logistik Berikat, untuk membangun fasilitas industri dan perdagangan yang efisien, karena lebih dekat dengan kegiatan ekonomi yang menurunkan biaya logistik	Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	
A.4	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Tidak ada dalam list Paket I	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	



## B. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (II)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi jo. Permenhut Nomor P.28/Menhut-II/2014	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah selesai pembahasan	
B.2	Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan IUPHHK HA, RE atau IUPHHK HTI pada Hutan Produksi	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015.	
B.3	Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah selesai pembahasan	
B.4	Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA jo. Permenhut Nomor P.4/Menhut-II/2012.	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah selesai pembahasan	
B.5	Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA.	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah selesai pembahasan	
B.6	Rancangan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Panas Bumi di Kawasan Konservasi	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah selesai pembahasan	
B.7	Revisi Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015	

## C. BKPM (II)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
C.1	<p>Revisi Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2003 jo Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis izin usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor.</p>	<p>Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap 1</p>	<p>Telah terbit Perka BKPM No.15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Perka mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk PTSP pusat di BKPM tanggal 26 Oktober 2015.</li> <li>b. Untuk BPM PTSP Prov/Kab/Kota, KPBPB dan KEK selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 08 Oktober 2015.</li> </ol>	
C.2	<p>Perka BKPM yang merevisi Perka BKPM No 3 Tahun 2012, agar dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan terutama perubahan investasi dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga K/L terkait dan asosiasi industri mendapatkan informasi perubahan.</p>	<p>Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap 1</p>	<p>Telah terbit Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Perka mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk PTSP pusat di BKPM tanggal 26 Oktober 2015.</li> <li>b. Untuk BPM PTSP Prov/Kab/Kota, KPBPB dan KEK selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 08 Oktober 2015.</li> </ol>	


## C. BKPM (II)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
C.3	Perka BKPM tentang Izin Prinsip Penanaman Modal	Ada dalam list tambahan Paket Deregulasi Tahap 1	<p>Telah Terbit Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Perka ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk PTSP pusat di BKPM tanggal 26 Oktober 2015.</li> <li>b. Untuk BPM PTSP Prov/Kab/Kota, KPBPB dan KEK selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 08 Oktober 2015.</li> </ul> <p>Termasuk didalamnya aturan tentang Izin Investasi 3 jam.</p>	
C.4	Perka BKPM tentang Fasilitas Penanaman Modal	Ada dalam list tambahan Paket Deregulasi Tahap 1	<p>Telah terbit Perka BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal, Perka ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk PTSP pusat di BKPM tanggal 26 Oktober 2015.</li> <li>b. Untuk BPM PTSP Prov/Kab/Kota, KPBPB dan KEK selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 08 Oktober 2015.</li> </ul>	


## **RINCIAN PAKET III**

---




## A. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (III)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan penyederhanaan Izin Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal untuk menunjang perekonomian di bidang pertanahan. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan merevisi aturan-aturan yang tercakup dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.	Tidak ada dalam list Deregulasi paket I	Telah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam kegiatan Penanaman Modal.	

## B. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (III)




NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas, untuk menegaskan otoritas Pemerintah sebagai kuasa penambangan dalam menetapkan harga gas bumi	Ada dalam Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi	

## C. Otoritas Jasa Keuangan (III)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
C.1	Peraturan tentang Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan ( <i>TRUST</i> )	
C.2	Peraturan tentang Skema asuransi pertanian	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Sudah selesai pembahasan	
C.3	Peraturan tentang Revitalisasi industri modal ventura	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	<p><b>Telah terbit 4 Peraturan OJK yang berfungsi untuk merevitalisasi Industri Modal Ventura yaitu:</b></p> <p>(1). POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.</p> <p>(2). POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.</p> <p>(3). POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura</p> <p>(4). POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura</p>	





## C. Otoritas Jasa Keuangan (III)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
C.4	Peraturan tentang Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Selesai pembahasan	
C.5	Peraturan tentang Pemberdayaan Lembaga Ekspor Indonesia	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit POJK No.: 40/POJK.05/2015 tgl 21 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
C.6	Peraturan tentang Implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Selesai pembahasan	






# RINCIAN PAKET IV

---


## A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (IV)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat guna meningkatkan dan memperluas cakupan Kredit Usaha Rakyat	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	
A.2	Penyusunan Keputusan Menteri Koordinator Bidang terkait Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Keputusan Menteri Koordinator Selaku ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat	

## B. Kementerian Ketenagakerjaan (IV)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Sudah selesai pembahasan dan digabung dengan B.7 dan B.2 menjadi Permen Upah Minimum	
B.2	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum dengan Menggunakan Formula	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Sudah selesai pembahasan dan digabung dengan B.1 dan B.7 menjadi Permen Upah Minimum	
B.3	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Struktur Skala Upah	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Sudah selesai pembahasan	
B.4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Tata Cara Pembayaran	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan	
B.5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Uang Service Pada Usaha Tertentu	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Service pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel	



## B. Kementerian Ketenagakerjaan (IV)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.6	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Komponen Hidup Layak	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Masih dalam pembahasan	
B.7	Peraturan Menteri tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Sudah selesai pembahasan dan digabung dengan B.1 dan B.2 menjadi Permen Upah Minimum	
B.8	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.	


## **RINCIAN PAKET V**

---

## A. Kementerian Keuangan (V)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Kebijakan Revaluasi Aset	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	PMK 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016	
A.2	Kebijakan menghilangkan pajak berganda dan investasi Real Estate, Properti, dan Infrastruktur	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit PMK No. 200/PMK.03/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan.	

## B. Otoritas Jasa Keuangan (V)


NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Kebijakan Deregulasi di bidang Perbankan Syariah	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan OJK No. 24/POJK.3/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah	





## **RINCIAN PAKET VI**

---



## A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (VI)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus	

## B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (VI)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Rancangan PP Pengusahaan Sumber Daya Air, untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi kegiatan industri	Ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan SDA	
B.2	Rancangan PP Sistem Penyediaan Air Minum sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan air untuk memenuhi hak rakyat.	Tidak ada dalam Paket Deregulasi tahap I	Telah terbit PP No. 122 Tahun 2015 tentang Pengusahaan SPAM	



## C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (VI)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
C.1	Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia	Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Perka BPOM No. 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia	
C.2	Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia	Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Perka BPOM No. 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia	




## **RINCIAN PAKET VII**

---

## A. Kementerian Keuangan (VII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit PP No. 9/2016 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu	
A.2	PP tentang Insentif PPh bagi Karyawan Industri Padat Karya	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah selesai harmonisasi sesuai dengan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.02.03-373 tanggal 3 Juni 2016	

## B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (VII)


NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Penyusunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Sertifikasi Tanah untuk Pedagang Kaki Lima	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tanah Negara Untuk Pdagang Kaki Lima	
B.2	Penyusunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu	
B.3	Penyusunan Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Penyediaan Lahan Peternakan	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/Ins/VII/2015 tentang Penyediaan Tanah/Lahan Bagi Peternakan	

## **RINCIAN PAKET VIII**


---




## A. Badan Informasi Geospasial (VIII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Penerbitan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	

## B. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (VIII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri, sebagai pedoman akselerasi pembangunan kilang minyak (termasuk produk turunannya) melalui dana APBN dan penugasan kepada Pertamina	Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	


## C. Kementerian Keuangan (VIII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
C.1	Merevisi Permenkeu Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan ke-3 atas Permenkeu Nomor 213/PMK.011/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif Bea Masuk Atas Barang Impor khusus lampiran terkait bea masuk 21 pos tarif	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit PMK No. 35/PMK.010/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor	


# RINCIAN PAKET IX

---


## A. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (IX)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Percepatan penyediaan dan pemenuhan tenaga listrik melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan	Ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I (F8.27)	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	



## B. Kementerian Pertanian (IX)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah PP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	

## C. Kementerian Komunikasi dan Informatika (IX)



NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
C.1	Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Masih dalam Pembahasan K/L terkait	

## D. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (IX)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
D.1	Kebijakan mengenai penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik (Single Billing)	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Sudah terbit Surat Menteri BUMN Nomor: S-169/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penerapan <i>Single Billing</i>	
D.2	Kebijakan Sinerjitas Badan Usaha Milik Negara dengan Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk Usaha Kecil dan Menengah, Geographical Indications, dan Ekonomi Kreatif	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Sudah terbit Surat Menteri BUMN Nomor: 163/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penugasan PT. Bhandha Ghara Reksa untuk Menjadi Integrator BUMN Logistik dan BUMN Trading	




## E. Kementerian Perhubungan (IX)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
E.1	Revisi Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Sudah terbit Instruksi Menhub No. 7/2016 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi	
E.2	Permenhub tentang Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Kepelabuhan Secara Elektronik	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 13 Tahun 2016 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Utama Makasar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok.	

# RINCIAN PAKET X

---





## A. Kemenko Bidang Perekonomian (X)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	


# RINCIAN PAKET XI

---

## A. Kementerian Keuangan (XI)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Keputusan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Nomor 0003/PDE/03/2016 tentang Manual Produk Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor	
A.2	Menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal 5% kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah selesai harmonisasi sesuai dengan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.02.03-374 tanggal 3 Juni 2016	
A.3	Menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai insentif dan kemudahan investasi di daerah yang antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I  Ada di dalam Paket XII	Sudah selesai pembahasan dan disampaikan kepada Sekretariat Negara	
A.4	Surat dari Dewan Pengarah INSW kepada Pengelola Portal INSW untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Indonesia Single Risk Management (ISRM) bagi Kementerian/Lembaga terkait INSW.	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Masih dalam pembahasan	



## B. Kementerian Kesehatan (XI)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Menerbitkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan Industri Farmasi dan Alat kesehatan dalam rangka mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri.	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan	

## **RINCIAN PAKET XII**



---

## A. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (XII)


NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
A.1	Menerbitkan PP yang mengatur mengenai perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas khususnya untuk mempermudah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dimana Modal Dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas	
A.2	Merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus	





## B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
B.1	Merevisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung	
B.2	Menerbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penerbitan IMB dan SLF untuk Bangunan Gedung UMKM Seluas 1300m2 dengan menggunakan desai prototipe	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan IMB dan SLF untuk Bangunan Gedung UMKM Seluas 1300m2 dengan menggunakan desai prototipe	

## C. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
C.1	Menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu Di Wilayah Tertentu	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu Di Wilayah Tertentu	


## D. Kementerian Perdagangan (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
D.1	Merevisi Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan	
D.2	Merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/Per/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang	



## E. Kementerian ESDM (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
E1	Merevisi Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN	


## F. Kementerian Dalam Negeri (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
F.1	Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pencabutan Izin Gangguan	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah	


## G. Kementerian Keuangan (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
G.1	Menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Secara Online	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Secara Online.	
G.2	Merevisi PP No. 48/1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I  Ada dalam Paket XI	Sudah selesai pembahasan dan disampaikan kepada Sekretariat Negara	

## H. PT Perusahaan Listrik Negara (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
H.1	Menerbitkan Surat Edaran Direksi tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Surat Edaran Direksi PT PLN No. 0001.E/Dir/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA	

# I. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (XII)


NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
I.1	Menerbitkan Perka BPJS untuk mendukung Pembayaran secara Online	Tidak ada dalam Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Peraturan Kepala BPJS No. 1/2016 untuk Pembayaran Online	




## J. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
J.1	Menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.42/2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha	


## K. Mahkamah Agung (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
K.1	Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah terbit SE Mahkamah Agung Nomor 2/2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan	

## L. PDAM DKI Jakarta (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
L.1	Menerbitkan Keputusan Direksi PDAM DKI Jakarta Tentang Proses Pelayanan Sambungan Air	Tidak ada dalam Paket Deregulasi Tahap I	Telah selesai pembahasan	

## M. PDAM Surabaya (XII)

NO	REGULASI/KEBIJAKAN	KETERANGAN	UPDATE PERKEMBANGAN	STATUS
M.1	Menerbitkan Keputusan Direksi PDAM Kota Surabaya tentang Proses Pelayanan Sambungan Air	Tidak ada dalam list Paket Deregulasi Tahap I	Telah selesai pembahasan	

# JADWAL PENYELESAIAN 20 PERATURAN TEKNIS... (1/4)

NO	PAKET/ KODE	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1.	Paket I (2 peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkeu</li> <li>▪ Kemenperin</li> </ul>	<p>Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut Inpres No. 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland FTA):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri Keuangan terkait insentif fiskal.</li> <li>2) Peraturan Menteri Perindustrian terkait penetapan industri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).</li> </ol>	Juni 2016
2.	Paket I (2 peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenperin</li> <li>▪ Kemenkeu</li> </ul>	<p>Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri Perindustrian terkait pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri (KI); tata cara pemberian izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); tata cara pemberian izin perluasan KI; pengelolaan KI; dst.</li> <li>2) Peraturan Menteri Keuangan terkait pemberian insentif perpajakan di KI.</li> </ol>	Juni 2016
3.	Paket I (1 peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kementan</li> </ul>	<p>Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri Pertanian terkait penetapan sarana hortikultura yang belum diproduksi di dalam negeri.</li> </ol>	Juni 2016

## JADWAL PENYELESAIAN 20 PERATURAN TEKNIS... (2/4)

NO	PAKET	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
5	Paket I  (2 peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KKP</li> <li>▪ Kemenkeu</li> </ul>	<p>Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri KP mengenai penetapan daerah tertentu penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil</li> <li>2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai menetapkan Harga Patokan LPG; tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil</li> </ol>	Juni 2016
6	Paket I dan IX  (2 peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkeu</li> <li>▪ Kemen ESDM</li> </ul>	<p>Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata kelola pemberian jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT. PLN; tata kelola jaminan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)</li> <li>2) Peraturan Menteri ESDM mengenai penyelesaian teknis terhadap tanah masyarakat yang berada di kawasan hutan.</li> </ol>	Juni 2016

## JADWAL PENYELESAIAN 20 PERATURAN TEKNIS... (3/4)

NO	PAKET	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
7.	Paket I (1 peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Kumham</li> </ul>	<p>Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kum HAM mengenai Orang Asing atau ahli waris yang merupakan orang asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia.</li> </ol>	Juni 2016
8.	Paket VI (3 peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemenkeu</li> <li>Kementerian ATR/BPN</li> </ul>	<p>Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut PP 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan komite verifikasi untuk penetapan besaran pengurangan PPh Badan.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai.</li> <li>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGB atau Hak Pakai.</li> </ol>	Juni 2016
9.	Paket VI (5 peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian PU PERA</li> <li>Pemerintah Daerah</li> <li>Kemen LHK</li> </ul>	<p>Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri PU PERA mengenai SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan; standard pelayanan minimal; kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM, dst.</li> <li>Peraturan Gubernur mengenai kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM; rencana induk SPAM lintas kabupaten/kota.</li> <li>Peraturan Bupati/Walikota mengenai kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM; rencana induk SPAM kabupaten/kota.</li> <li>Peraturan Menteri LHK mengenai penyelenggaraan SPAL untuk air limbah domestik dan non domestik.</li> <li>Perpres mengenai pembentukan lembaga yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM.</li> </ol>	Juni 2016

## JADWAL PENYELESAIAN 20 PERATURAN TEKNIS... (4/4)

NO	PAKET	K/L	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
9.	Paket VIII  (1 peraturan)	▪ Kemenkeu	Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri: 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai penggantian atas biaya terkait penyiapan pembangunan kilang minyak dan/atau pendampingan transaksi.	Juni 2016
10.	Paket III  (1 peraturan)	▪ Kementerian ESDM	Peraturan Teknis/Peraturan Turunan sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi: 1) Peraturan Menteri ESDM mengenai Tata Cara Penetapan Harga Gas Bumi; Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu; Tata Cara Penetapan Tarif Penyaluran Gas Bumi	Juni 2016